

Perspektif dan *Frame* Ekspresi Permintaan Maaf dalam Diskusi Indonesian Lawyers Club “50 Tahun G30S/PKI, Perlukah Negara Minta Maaf?”: Kajian Linguistik Kognitif

Imam Musyayyab¹; Sailal Arimi²

^{1,2}Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Posel: imammusyayyab@gmail.com

Abstrak: Pidato kepresidenan pada HUT RI ke-70 menuai kontroversi. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa negara akan meminta maaf kepada para “korban” pelanggaran HAM yang merujuk kepada pihak Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 29 September 2015, Indonesian Lawyers Club (ILC) menggelar diskusi dengan tema “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?” untuk menanggapi isu tersebut. Saat diskusi berlangsung, para tamu undangan saling tunjuk pihak yang seharusnya meminta maaf. Akibatnya, banyak sudut pandang yang membiaskan subjek yang seharusnya meminta maaf. Peneliti menelusuri fenomena ini lewat kajian Linguistik Kognitif untuk membongkar perspektif dan latar belakang pengetahuan (*frame*) permintaan maaf. Peneliti mentranskripsikan data dengan menggunakan metode simak teknik sadap dan catat. Setelah itu, peneliti mengklasifikasi dan menganalisisnya dengan metode padan. Hasilnya, perspektif mengenai wacana permintaan maaf terwujud dengan adanya pengutamaan (subjek) dari setiap ekspresi kebahasaan, yaitu perspektif dengan subjek pihak keluarga dan terduga PKI, perspektif dengan subjek pihak TNI AD, dan perspektif dengan subjek pihak NU dan Muhammadiyah. Peneliti mengklasifikasikan *frame*, pengetahuan yang melatari terbentuknya sebuah konsep, menjadi tiga *frame* yang berbeda berdasarkan waktunya, yaitu waktu sebelum peristiwa G30S (pihak NU dan Muhammadiyah), saat terjadi peristiwa G30S (pihak TNI AD), dan setelah peristiwa G30S (pihak keluarga dan terduga PKI).

Kata kunci: permintaan maaf, perspektif, *frame*.

Perspective and Frame on the Expression of Apology in Indonesian Lawyers Club Discussion “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?”: A Cognitive Linguistic Studies

Abstract: The Presidential Speech at the 70th Indonesian Independence Day caused a controversy. Some people assumed that the state would apologize to the victims of the human rights violations mentioning the Indonesian Communist Party (PKI). On 29 September 2015, the Indonesian Lawyers Club (ILC) held a discussion bringing up the theme “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?” to respond to the issue. During the discussion, the invited guests pointed to each others who should apologize. The researchers investigate this phenomenon with Cognitive Linguistic studies to reveal perspectives and background knowledge (frames) of apologies. The researchers transcribed the data using the observation method of tapping and note-taking techniques. After that, the researchers classified and analysed using the matching method. Based on the analysis carried out, perspective on apologies are manifested by the prioritisation (subject) of each linguistic expression, i.e., perspectives with the subject of the family and suspected PKI, perspective with the subject of the Army (TNI), and perspective with the subjects of the NU and Muhammadiyah. In this study, the researchers classified three different frames, the knowledge behind the formation of a concept, based on the time, namely the time before the G30S incident (the NU and Muhammadiyah parties), the time of G30S event (TNI), and after the G30S (PKI family and suspected PKI).

Keywords: Apology, Perspective, Frame.

PENDAHULUAN

Presiden RI, Joko Widodo, dalam pidato kenegaraannya pada HUT RI yang ke-70 menyampaikan bahwa negara akan melakukan rekonsiliasi pada “korban” pelanggaran HAM di masa lalu. Gagasan tersebut menarik perhatian masyarakat, sehingga banyak yang mengasumsikan bahwa negara akan meminta maaf pada para eks-tahanan politik (eks-tapol) dan keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Secara otomatis, konsekuensi tersebut menuai kontroversi dan banyak yang menentang.

Indonesian Lawyers Club (ILC), salah satu program stasiun televisi Indonesia, melangsungkan diskusi selama kurang lebih tiga jam untuk menanggapi isu yang berkembang di masyarakat tersebut. Para tokoh yang diundang dalam diskusi ini, antara lain keluarga dan para terduga PKI, pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dan tokoh organisasi keagamaan di Indonesia (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah). Acara tersebut menampilkan diskusi dengan mengusung tema “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?”.

Dalam diskusi tersebut, para tamu undangan mengklaim masing-masing pihak mereka adalah “korban”. Perebutan klaim “korban” mengakibatkan para tamu undangansaling tunjuk pihak yang seharusnya meminta maaf. Perbedaan tersebut didasari oleh latar belakang pengetahuan –sesuatu yang memberikan *frame* dalam pengetahuan seseorang– yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan tujuan yang berbeda, masing-masing memiliki tendensi.

Keluarga anggota PKI, Komnas HAM, dan Koordinator *International Peoples Tribunal 1965* mengklaim pihak PKI dan eks-tapol yang menjadi “korban” atas peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S 1965). Mereka merasa bahwa keluarga dan para terduga PKI lainnya tidak terlibat atas peristiwa G30S 1965. Beberapa di antara tokoh yang melakukan G30S 1965 memang tokoh intelektual PKI, tetapi bukan berarti PKI secara keseluruhan. Peristiwa pembersihan para terduga PKI setelah G30S 1965 menjadi tolok ukur mereka untuk mengusut kasus pelanggaran

HAM. Di samping itu, mereka menganggap ada sejarah yang disimpangkan. Sejarah mengenai peristiwa G30S 1965 yang tertulis saat ini, bukanlah peristiwa yang sebenarnya terjadi. Perlu ada pengungkapan kembali sejarah yang dianggapnya telah diselewengkan.

Di lain pihak, TNI AD menganggap bahwa pihak merekalah yang menjadi “korban” atas peristiwa G30S 1965. Mereka menganggap PKI telah melancarkan kudeta berdarah pada tahun 1965 yang mengorbankan beberapa jenderal mereka. Keluarga para jenderal yang ditinggalkan pun mengalami trauma dan duka yang sangat mendalam.

Selain itu, Pihak NU juga menyampaikan beberapa perlakuan kejam yang telah dilakukan oleh anggota PKI terhadap tempat ibadah, para ulama, dan jamaah NU sebelum peristiwa G30S 1965 terjadi.

Berdasarkan beberapa persoalan yang peneliti temukan dalam diskusi ILC tersebut, peneliti ingin menelusuri lebih jauh fenomena ini. Oleh karena itu, peneliti menentukan tujuan penelitian ini untuk menganalisis perspektif wacana permintaan maaf dan memaparkan *frame* pembentuk konsep permintaan maaf.

LANDASAN TEORI

Perspektif

Perbedaan klaim “korban” dalam diskusi ILC dapat ditelusuri dengan perspektif. Langacker menjelaskan (via Sanders dan Spooren, 1997) gagasan perspektif memiliki dua aspek yang terhubung dan tidak dapat dipisahkan, yaitu pendapat dan orientasi. Pendapat adalah sudut pandang dari sesuatu yang direpresentasikan, orientasi adalah representasi khusus yang dihasilkan dari objek tertentu. Struktur sudut pandang dalam ekspresi kebahasaan dapat dikaitkan dengan satu partisipan/subjektivitas atau lebih, yang mungkin hadir dalam suatu peristiwa (Dancygier, 2012).

Perspektif didefinisikan sebagai cara pandang terhadap sebuah kejadian atau peristiwa dengan pengutamaan peserta (Arimi, 2015: 47). Dengan kata lain, seseorang dapat memandang suatu kejadian yang sama dengan cara pandang yang berbeda. Perhatikan ilustrasi berikut.

- a. Tono menjual sepeda kepada Budi.
- b. Budi membeli sepeda dari Tono.

Kedua ilustrasi tersebut memiliki kejadian yang sama, yaitu jual-beli, tetapi memiliki makna berbeda. Dalam hal ini, poin perspektif dapat mengungkap letak perbedaan makna tersebut dengan pengutamaan subjek. Ilustrasi (a) menyatakan dengan sudut pandang Tono, sedangkan ilustrasi (b) menyatakan dengan sudut pandang Budi. Jika satuan kebahasaan dalam ilustrasi tersebut ditambahkan, perbedaan maknanya akan semakin jelas. Perhatikan ilustrasi berikut.

- c. Tono menjual sepeda kepada Budi karena sedang butuh.
- d. Budi membeli sepeda dari Tono karena sedang butuh.

Perbedaan dari kedua ilustrasi tersebut semakin jelas. Ilustrasi (c) menjelaskan Tono yang sedang butuh sesuatu, dalam konteks ini adalah uang, dengan menjual sepeda. Ilustrasi (d) menjelaskan Budi sedang membutuhkan sepeda dengan membeli dari Tono.

Perspektif sangat berperan untuk membangun makna dalam sebuah peristiwa. Begitu pula dalam peristiwa perebutan klaim “korban” dalam diskusi ILC yang mengaburkan subjek untuk meminta maaf.

Frame

Selain perspektif, hal yang mempengaruhi terbentuknya makna adalah *frame*. Sebelum makna terbentuk, seseorang mengonsepkannya terlebih dahulu. Referensi atas konsep tersebut didapatkan dari pengalaman yang dilalui. Menurut Arimi (2015) satuan kebahasaan tidak terjadi dalam kekosongan, dan setiap satuan kebahasaan itu terjadi karena ada pengetahuan yang melatarinya. *Frame* berkaitan dengan elemen-elemen dan entitas yang berhubungan dengan kultur tertentu dan kejadian yang melekat pada pengalaman manusia (Evans dan Green, 2006: 222). Fillmore (via Park, 2010: 12) menyatakan bahwa dalam psikologi kognitif, *frame* adalah struktur pengetahuan mental yang terakumulasi melalui pengalaman kultural yang berulang. Dengan kata lain, *frame* adalah pembingkai terhadap pengalaman seseorang yang dapat pula disebut sebagai latar belakang pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Tiga metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian data. Peneliti menggunakan metode simak dengan teknik sadap dan teknik catat untuk mengumpulkan data dengan menyimak video ILC dengan tema “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?” yang berdurasi selama kurang lebih tiga jam. Lalu, peneliti mentranskripsikan tiap pernyataan dalam diskusi tersebut. Kemudian, peneliti mengklasifikasikan dan menganalisis data yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode padan.

Objek kajian ini dibatasi berdasarkan data dan teori. Berdasarkan data, penelitian ini dibatasi pada diskusi ILC dengan tema “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?”. Penelitian ini tidak menelusuri ekspresi permintaan maaf pada ranah kebahasaan lain. Berdasarkan teori, penelitian ini menggunakan teori linguistik kognitif secara lebih spesifik karena objek kajian permintaan maaf dianalisis berdasarkan perspektif dan *frame*. Hasil penelitian kemudian disajikan dengan metode informal disertai skema/bagan seperlunya.

PEMBAHASAN

Analisis Perspektif Wacana Permintaan Maaf

Sejatinya, permintaan maaf dilakukan oleh pelaku untuk mengakui kesalahannya dan meminta ampunan dari “*korban*”. Akan tetapi, perebutan klaim “*korban*” dalam diskusi tersebut semakin mengaburkan subjek pelaku, sehingga masing-masing pihak saling tunjuk pihak yang seharusnya meminta maaf.

Jika melihat dari rekam sejarah, tiga pihak yang terbagi dalam diskusi tersebut dapat dikatakan sebagai “*korban*”. Hal itu didasari oleh tiga peristiwa yang berbeda berdasarkan waktunya, yaitu waktu sebelum peristiwa G30S 1965 (NU dan Muhammadiyah sebagai “*korban*”), ketika peristiwa G30S 1965 (TNI AD sebagai “*korban*”), dan setelah peristiwa G30S 1965 (keluarga dan para terduga PKI sebagai “*korban*”), sehingga masing-masing pihak saling tunjuk pihak yang seharusnya meminta maaf.

Perspektif sebagai ‘*korban*’

Beberapa ujaran yang terbangun dalam diskusi ILC tersebut mengacu pada hal yang sama, yaitu perspektif sebagai “*korban*”, tetapi memiliki makna berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari subjek dalam ujaran yang dikatakan. Subjek-subjek tersebut antara lain pihak keluarga dan para terduga PKI, pihak TNI AD, dan pihak NU dan Muhammadiyah.

Berikut beberapa perspektif sebagai “*korban*” dengan argumen yang disampaikan sebagai cara untuk menguatkan gagasan masing-masing pihak adalah “*korban*”.

Perspektif sebagai “*korban*” dengan Subjek Keluarga dan Terduga PKI

Berdasarkan perspektif sebagai “*korban*” dengan subjek keluarga dan terduga PKI ditunjukkan dengan perspektif dan argumen untuk mengungkapkan keinginannya agar pihak lain meminta maaf kepada pihaknya. Perhatikan ekspresi kebahasaan berikut.

- (1) “... kalau saya boleh mewakili kawan-kawan “*korban*”, katakan begitu, itu sebetulnya kami mengharapkan rekonsiliasi yang bermartabat, artinya pemahaman rekonsiliasi ini begitu banyak ragamnya, dan dimulai dari yang baik sekali ...”.

(Ilham Aidit, menit ke-27.35)

Konstruksi tuturan (1) membangun situasi dari sudut pandang “*korban*” yang mengharapkan terjadinya rekonsiliasi. Subjek dari konstruksi tersebut adalah Ilham Aidit yang berperan langsung sebagai “*korban*”. Maka dari itu, dia menginginkan terlaksananya rekonsiliasi yang dilakukan secara serius dengan mengungkapkan kata ‘bermartabat’ atau ‘memiliki martabat’ pada tuturannya. Martabat (KBBI) berarti tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Jadi, ‘memiliki martabat’ berarti memiliki harga diri. Ilham Aidit mengagungkan terwujudnya rekonsiliasi tersebut karena ada tendensi tertentu, yaitu menginginkan pengakuan dari negara atas kesalahan yang pernah diperbuat negara kepada golongannya (keluarga dan para terduga PKI). Dengan demikian, penyampaian Ilham Aidit yang mengklaim bahwa dirinya adalah “*korban*”, maka secara implisit dalam konstruksi tersebut menempatkan negara sebagai pelaku atas peristiwa pelanggaran HAM.

- (2) “... meminta maaf kepada “*korban*” sangat mulia, ada jiwa kesatria di situ, ada jiwa kesatria yang bisa diwariskan kepada generasi muda...”.

(Ilham Aidit, menit ke-31.07)

Konstruksi tuturan (2) menempatkan “*korban*” sebagai objek yang dimintai maaf. Maka dari itu, ada subjek yang melakukan permintaan maaf. Apabila dikembalikan kepada konteks, orang yang menuturkan kata-kata tersebut adalah Ilham Aidit yang sejak awal menyebutkan pihak PKI adalah “*korban*”. Maka, pelaku atau subjek yang perlu meminta maaf adalah negara yang diwakilkan oleh pemerintah. Jadi, konstruksi tersebut membangun makna bahwa pelaku adalah negara. Maka dari itu, negara perlu meminta maaf agar memberikan contoh baik pada generasi muda.

- (3) “... “*korban*” yang sudah begitu lama menderita, tanpa tahu sebabnya, tanpa diadili, bertahun-tahun dipenjara, bisa memaafkan ketika ada yang meminta maaf, artinya ada jiwa kesatria, maaf, jiwa besar ...”.

(Ilham Aidit, menit ke-31.12)

Konstruksi tuturan (3) memiliki subjek “*korban*” sebagai entitas yang mengalami penderitaan cukup lama. Penderitaan tersebut tidak disertai dengan

dendam dari para “korban”. Akan tetapi sebaliknya, “korban” mampu memaafkan kepada pihak yang pernah bersalah kepadanya. Konstruksi itu mengutamakan “korban” sebagai pihak yang berjiwa besar karena mampu untuk memaafkan. Jadi, negara pun sebaiknya mencontoh jiwa besar yang telah dilakukannya.

Argumen Pihak Keluarga dan Terduga PKI

Argumen dari pihak keluarga dan terduga PKI lebih memperkuat alasan mereka sebagai pihak yang menjadi “korban”. Selain itu, pada ungkapannya terdapat keinginan tertentu sebagai tujuan agar pihak lain yang ditunjuknya sebagai pelaku dapat meminta maaf. Berikut argumen yang diungkapkan oleh pihak keluarga dan terduga PKI

Argumen Formalitas

Berdasarkan hasil penelitian terdapat argumen formalitas dalam ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.

- (4) “... sebenarnya substansinya bukan di “minta-maaf”, intinya adalah pengakuan yang paling penting...”.

(Nur Khaeron, menit ke-19.23)

Konstruksi tuturan (4) membangun situasi dari sudut pandang Nur Khaeron yang menyatakan bahwa minta maaf bukanlah sebuah inti yang diinginkan. Maka dari itu, permintaan maaf ditempatkan sebagai pendamping yang mengantarkan kepada hal yang diinginkan, yaitu sebuah pengakuan. Secara eksplisit dia menjelaskan bahwa ‘substansinya bukan di minta maaf’. Dengan demikian, permintaan maaf yang diharapkan hanyalah formalitas. Konstruksi tersebut memiliki substansi bahwa permintaan maaf adalah cara untuk mengemukakan keinginan sebenarnya.

Argumen Penindakan Lebih Lanjut

Berdasarkan hasil penelitian terdapat argumen penindakan lebih lanjut dalam ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.

- (5) “... permintaan maaf dari negara, Presiden Jokowi sebagai kepala negara itu sangat esensial dan harus ditindaklanjuti dengan pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan untuk kemudian menuju rekonsiliasi, reparasi, dan sebagainya...”.

(Nursyahbani Katjasungkana, menit ke-88.21)

Konstruksi tuturan (5) membangun situasi dari sudut pandang Nursyahbani Katjasungkana yang menyatakan bahwa dengan dilakukannya permintaan maaf dari pemerintah akan mengantarkan kepada rekonsiliasi, reparasi, dan sebagainya. 56 Penekanan dalam konstruksi tersebut adalah pada permintaan maaf yang merupakan alat untuk mengantarkannya kepada tujuan tertentu. Hal yang menjadi tujuan dilaksanakannya permintaan maaf, yaitu sebagai pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan. Tujuan-tujuan tersebut merupakan hasil penindakan lebih lanjut dari permintaan maaf. Dengan demikian, ekspresi kebahasaan tersebut memiliki substansi bahwa ada keinginan diungkapkannya kebenaran suatu peristiwa dan terjadinya rekonsiliasi dengan terlebih dahulu dilakukan sebuah pengakuan kesalahan lewat media meminta maaf oleh pemerintah.

Argumen Pengungkapan Kebenaran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat sejumlah argumen pengungkapan kebenaran dalam ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.

- (6) "... Pengungkapan kebenaran dulu pak diselesaikan baru soal minta maaf ...".
(Nursyahbani Katjasungkana, menit ke-121.16)

Konstruksi tuturan (6) membangun situasi dari sudut pandang Nursyahbani Katjasungkana yang menginginkan pengungkapan kebenaran terlebih dahulu, apabila pihaknya (PKI) terbukti bersalah, maka dia dan pihaknya akan meminta maaf. Nursyahbani Katjasungkana merasa pihaknya (PKI) dikambing-hitamkan oleh negara melalui peristiwa G30S. Maka dari itu, dia menuntut pengungkapan kebenaran terhadap sejarah tersebut. Kemudian, substansi konstruksi tersebut adalah keinginan mengungkapkan kebenaran sejarah menurut data yang dia peroleh.

Perspektif sebagai "*korban*" dengan Subjek Pihak TNI AD

Berdasarkan perspektif sebagai "*korban*" dengan subjek pihak TNIAD ditunjukkan dengan perspektif dan argumen untuk mengungkapkan keinginannya agar pihak lain meminta maaf kepada pihaknya. Perhatikan ekspresi kebahasaan berikut.

- (7) "... sekarang, pertanyaan saya ke Bang Karni minta maaf ke siapa? Karena kami juga "*korban*" kan? ... mungkin kalau saya, harusnya dari pihak yang melakukan kudeta, ada yang masih hidup, anak-anaknya masih ada, merekalah yang harus minta maaf pada konstituennya...".

(Amelia Yani, menit ke-44.28)

Konstruksi tuturan tersebut membangun situasi dari sudut pandang Amelia Yani, yang menyatakan dirinya sebagai "*korban*" atas peristiwa G30S. Dalam konstruksi tersebut, Amelia Yani merasa, seharusnya, keluarga dari pihak yang melakukan kudeta (merujuk kepada PKI) meminta maaf kepada pihaknya (TNI). Pada konstruksi tersebut, mengutamakan 'pihak' yang melakukan kudeta terhadap negara, dan menyebabkan Amelia Yani kehilangan ayahnya, Jenderal Ahmad Yani. Hal yang pokok dalam konstruksi tersebut adalah keinginan Amelia Yani mendapatkan permintaan maaf dari pihak yang membuatnya menjadi "*korban*".

- (8) "... lebih baik, sebagai kepala negara, dia mendata siapa saja yang menjadi "*korban*", anak cucu ini, diperhatikan, dibantu mereka, mungkin ada yang barangkali kesulitan, dan yang tua-tua perlu dibantu ...".

(Josef Blasius Bapa, menit ke-66.31)

Konstruksi tuturan (8) membangun situasi dari sudut pandang 'dia' yang merujuk kepada kepala negara atau Presiden, dan sebagai peran yang seharusnya mendata siapa saja yang menjadi "*korban*". Pada konstruksi tersebut mendata adalah verba transitif, yang memiliki objek "*korban*". Konstruksi yang dituturkan oleh Josef Blasius Bapa tersebut, menanggapi rencana Presiden Joko Widodo yang akan melakukan rekonsiliasi terhadap "*korban*" pelanggaran HAM berat. Substansi konstruksi yang terbangun dari tuturan tersebut, sebenarnya untuk menunjukkan "*korban*" (pihak TNI AD) dari peristiwa G30S. Selain itu, diharapkan Presiden dapat membantu pihaknya daripada mengurus rekonsiliasi.

(9) "... kenapa ini kok Komnas HAM memihak, hanya memikirkan mereka dan tidak memikirkan "korban" kita ...".

(Kivlan Zein, menit ke-70.07)

Konstruksi (9) membangun situasi dari sudut pandang 'Komnas HAM' yang memihak dan memikirkan 'mereka' (pihak PKI), tidak memikirkan "korban" (pihak TNI). Komnas HAM menempati subjek yang memiliki verba transitif 'memikirkan', dan terdapat dua objek, yaitu mereka (pihak PKI) dan "korban" (pihak TNI). Substansi dari konstruksi tersebut adalah bentuk kekecewaan terhadap subjek (Komnas HAM) yang memihak kepada keluarga PKI.

Argumen Pihak TNI AD

Argumen dari pihak TNI AD, lebih memperkuat alasan mereka sebagai pihak yang menjadi "korban". Selain itu, pada ungkapannya terdapat keinginan tertentu agar pihak lain yang bersalah meminta maaf pada pihaknya. Berikut argumen yang diungkapkan oleh pihak TNI AD.

Argumen Tuntutan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat argumen tuntutan dalam ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.

(10) "... akan menjadi cerita yang tidak berkesudahan, setelah minta maaf tuntutan ganti rugi, kemudian harus sidang, dan sebagainya...".

(Josef Blasius Bapa, menit ke-66.53)

Konstruksituran (10) membangun situasi dari sudut pandang Josef Blasius Bapa, yang menyatakan bahwa apabila pemerintah melakukan permintaan maaf akan menimbulkan tuntutan-tuntutan yang lain. Dengan demikian, pengutamaannya adalah tuntutan. Jadi, substansinya adalah adanya faktor lain yang menjadi keinginan dari pihak keluarga dan terduga PKI.

Argumen Sebab – Akibat

Berdasarkan hasil penelitian terdapat argumen sebab-akibat dalam ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.

(11) "... kau yang memulai, kau yang mesti mengakhiri. Nah, maka dengan demikian minta maaf dulu kepada "korban" kita...".

(Mayor Jenderal Kivlan Zein, menit ke-72.54)

Konstruksituran (11) membangun situasi dari sudut pandang Kivlan Zein yang memandang bahwa pihak yang dipanggil 'kau' harus meminta maaf kepada pihaknya (TNI). Permintaan maaf, dianggapnya terjadi karena suatu proses sebab-akibat. Penyebab terjadinya peristiwa yang mengharuskan adanya permintaan maaf, diyakini Kivlan Zein berasal dari pihak yang disebutkan dalam konstruksi tersebut sebagai 'kau'. Dengan demikian, substansinya adalah kesadaran diri, bahwa pihak yang menjadi penyebab permasalahan seharusnya yang meminta maaf.

Argumen Penyesalan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat argumen penyesalan dalam ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.

(12) "... Kalau negara minta maaf kepada keluarga "korban", terutama PKI, itu mengandung arti secara implisit, negara mengakui kesalahan yang dilakukan pada peristiwa G30S/PKI ...".

(Tjipta Lesmana, menit ke-147.45)

Konstruksi tuturan (12) membangun situasi dari sudut pandang Tjipta Lesmana yang menyatakan bahwa jika saja negara meminta maaf, secara implisit telah mengakui kesalahan negara pada peristiwa G30S. Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi atas kesalahan PKI, bukan negara. Dengan demikian, tidak elok jika 62 meminta maaf kepada "korban" (pihak keluarga dan terduga PKI). Substansinya adalah penyesalan apabila negara meminta maaf kepada pihak keluarga dan terduga PKI.

Argumen Kesadaran Diri

Berdasarkan hasil penelitian terdapat argumen kesadaran diri dalam ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.

(13) "... sekarang yang golongan dari merasa benar, sekarang nyatakan mau minta maaf nggak kepada "korban"- "korban" kita, mau minta maaf nggak sekarang? Kalau minta maaf, kita akan nyatakan kita akan selesaikan selesai semuanya, ya "korban"- "korban" kita tanggal 1 Oktober langsung mereka mengatakan ...". (Kivlan Zein, menit ke-121.01)

Konstruksituturan (13) membangun situasi dari sudut pandang Kivlan Zein yang menyatakan bahwa akan selesai permasalahan apabila dari pihak keluarga dan terduga PKI mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada "korban"- "korban"-nya. Kivlan Zein menyatakan bahwa pihak keluarga dan terduga PKI adalah 'golongan yang merasa benar' karena menuntut permintaan maaf dari negara. Sebaliknya, dia menganggap bahwa pihak PKI adalah pihak yang bersalah, dan seharusnya meminta maaf. Meminta maaf, diartikannya sebagai kesadaran diri dari pihak yang bersalah. Selain itu, dia merasa pihaknya (TNI) dan negara bukanlah pihak yang bersalah. Dengan demikian, substansi konstruksi tersebut adalah kekecewaan Kivlan Zein atas tindakan yang dilakukan oleh keluarga dan para terduga PKI.

Perspektif sebagai "korban" dengan Subjek Pihak Organisasi Keagamaan di Indonesia

Berdasarkan perspektif sebagai "korban" dengan subjek pihak organisasi keagamaan di Indonesia ditunjukkan dengan perspektif dan argumen untuk mengungkapkan keinginannya agar pihak lain meminta maaf kepada pihaknya. Perhatikan ekspresi kebahasaan berikut.

(14) "... yang ini juga merasa jadi "korban", yang sana juga merasa jadi "korban", apalagi yang NU ini saya dapat banyak sms dari Jawa Timur dari Kyai-Kyai masuk saya bukain satu-satu tolong sampaikan, NU juga merasa jadi "korban" ... tolong, misalnya tahun '49, nanti kalau nggak ada data tak kasih datanya, Masjid Agung Trenggalek, Imam dan Takmir masjid serta jamaahnya disiksa, dibakar, itu ditulis oleh koran waktu itu, Jawa Timur itu nulis lebar-lebar, tahun '51 markas Brimob Jakarta Utara dan gedung pendidikan Nasional Bogor juga dibakar 88 meninggal, Masjid Agung Kembang Kuning Surabaya, ini peninggalan Sunan Ampel itu juga dibakar dengan kitab-kitabnya ...".

(Marsudi Syuhud, menit ke-102.00)

Konstruksi tuturan tersebut membangun situasi dari sudut pandang tokoh NU yang menyatakan bahwa yang menjadi “korban” bukan hanya dari pihak PKI dan TNI AD. Konstruksi tersebut mengutamakan NU sebagai “korban”. Pada konstruksi tersebut, pihak NU menjabarkan peristiwa-peristiwa yang menempatkan pihaknya pada posisi “korban”. Pelaku pada peristiwa tersebut, tidak diucapkan secara langsung, namun secara implisit menunjuk ke arah PKI karena berkaitan dengan gerakan-gerakan yang pernah dilakukan PKI sesuai dengan tahun yang disebutkan dalam konstruksi tersebut. Substansinya adalah pihak NU menginginkan kasus itu diangkat juga karena hal itu menyangkut peristiwa pelanggaran HAM.

Argumen Pihak NU dan Muhammadiyah

Argumen dari pihak keagamaan (NU dan Muhammadiyah) lebih menekankan pada sudut pandang agama yang terkesan menengahi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Berikut argumen yang diungkapkan oleh pihak NU dan Muhammadiyah.

Argumen Kehormatan

(15) “... kalau saling memberi maaf rasanya terhormat semua tapi juga tidak kalah terhormatnya semuanya jika saling minta maaf...”.

(Marsudi Suhud, menit ke-163.43)

Konstruksi tersebut membangun situasi dari sudut pandang Marsudi Suhud yang menyatakan bahwa meminta ataupun memberi maaf adalah hal yang terhormat. Marsudi Suhud mengangkat nama baik bagi siapa pun yang meminta ataupun memberi maaf dengan menggunakan kata terhormat. Hal itu dilakukan karena pada diskusi tersebut, saling mengklaim diri sebagai pihak “korban”, sehingga tidak ada pihak yang berinisiatif untuk meminta maaf. Dengan demikian, substansi konstruksi tersebut, yaitu menjadi penengah dengan mengangkat martabat orang yang meminta maaf, sama dengan orang yang memberi maaf.

Inferensi Perspektif Wacana Permintaan Maaf

Ujaran-ujaran yang menunjukkan keadaan masing-masing pihak sebagai “korban” diperoleh dari sistem kognisi yang memiliki perspektif sebagai “korban”. Sistem kognisi tersebut memiliki argumen yang menguatkan posisi masing-masing subjek. Hal itu menyebabkan hadirnya anggapan pihak lain sebagai pelaku dan perlu meminta maaf kepada pihaknya.

Frame Permintaan Maaf

Dalam linguistik kognitif, latar belakang pengetahuan disebut sebagai *frame*. *Frame* selalu berkaitan dengan interpretasi dalam suatu konstruksi makna. Peneliti membagi interpretasi yang muncul dalam diskusi tersebut menjadi tiga, yaitu interpretasi menurut pihak TNI, pihak keluarga dan terduga PKI, dan pihak NU dan Muhammadiyah. Interpretasi-interpretasi tersebut tidak lepas dari *frame* pembentuknya.

Berdasarkan Pemahaman Pihak Keluarga dan Terduga PKI

Berdasarkan pihak keluarga dan para terduga PKI ditemukan hasil penelitian sebagai berikut.

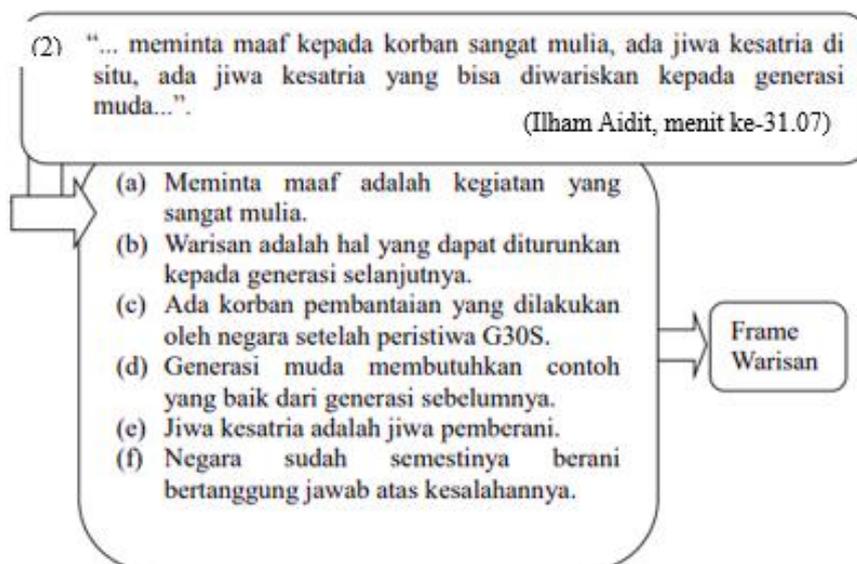
- (2) "... meminta maaf kepada "*korban*" sangat mulia, ada jiwa kesatria di situ, ada jiwa kesatria yang bisa diwariskan kepada generasi muda...".
(Ilham Aidit, menit ke-31.07)

Ekspresi kebahasaan yang dituturkan oleh Ilham Aidit tersebut dapat dimaknai dengan membangun konstruksi berdasarkan latar belakang pengetahuan sebagai berikut.

- (a) Meminta maaf adalah kegiatan yang sangat mulia.
- (b) Warisan adalah hal yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya.
- (c) Terdapat "*korban*" pembantaian yang dilakukan oleh negara setelah peristiwa G30S.
- (d) Generasi muda membutuhkan contoh yang baik dari generasi sebelumnya.
- (e) Jiwa kesatria adalah jiwa pemberani.
- (f) Negara sudah semestinya berani bertanggung jawab atas kesalahannya.

Berdasarkan latar belakang pengetahuan tersebut, terdapat makna bahwa "permintaan maaf dari negara kepada "*korban*" pembantaian terduga PKI setelah peristiwa G30S 1965 dapat dijadikan sebagai contoh yang baik karena menunjukkan sifat berani dan bertanggungjawab, serta dapat diwariskan kepada generasi muda". Selain itu, hal tersebut tidak terlepas dari konsep bahwa permintaan maaf adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesalahan. Jiwa kesatria adalah jiwa yang dimiliki oleh para kesatria, yakni keberanian. Berdasarkan ekspresi kebahasaannya, Ilham Aidit memperhatikan peristiwa setelah terjadinya tragedi G30S 1965. Maka dari itu, dia menginginkan permintaan maaf dari pemerintah dapat dilakukan. Kemudian, pada ekspresi kebahasaan tersebut diungkapkan bahwa permintaan maaf adalah hal yang dapat 'diwariskan'. Dengan demikian, *frame* yang membentuk pengetahuan dalam konstruksi tersebut adalah *frame* warisan.

Skema 1: *Frame* Warisan



Peneliti menelusuri pikiran Ilham Aidit berdasarkan ekspresi kebahasaan (2) yang memiliki latar belakang pengetahuan (a) sampai (f). Pada data tersebut menunjukkan permintaan maaf sebagai entitas yang dapat diwariskan. Warisan merupakan sesuatu yang berguna dan berharga, dan diberikan kepada generasi berikutnya. Begitu juga dengan permintaan maaf, yang dipahami dapat dijadikan sebagai contoh yang baik untuk diterapkan, dan relevan sebagai warisan untuk membentuk mental generasi berikutnya. Dengan demikian warisan merupakan *frame* dalam kognisi penuturnya.

Berdasarkan Pemahaman Pihak TNI AD

Berdasarkan pihak TNI AD ditemukan hasil penelitian sebagai berikut.

(10) "... akan menjadi cerita yang tidak berkesudahan, setelah minta maaf tuntutan ganti rugi, kemudian harus sidang, dan sebagainya...".
(Josef Blasius Bapa, menit ke-66.53)

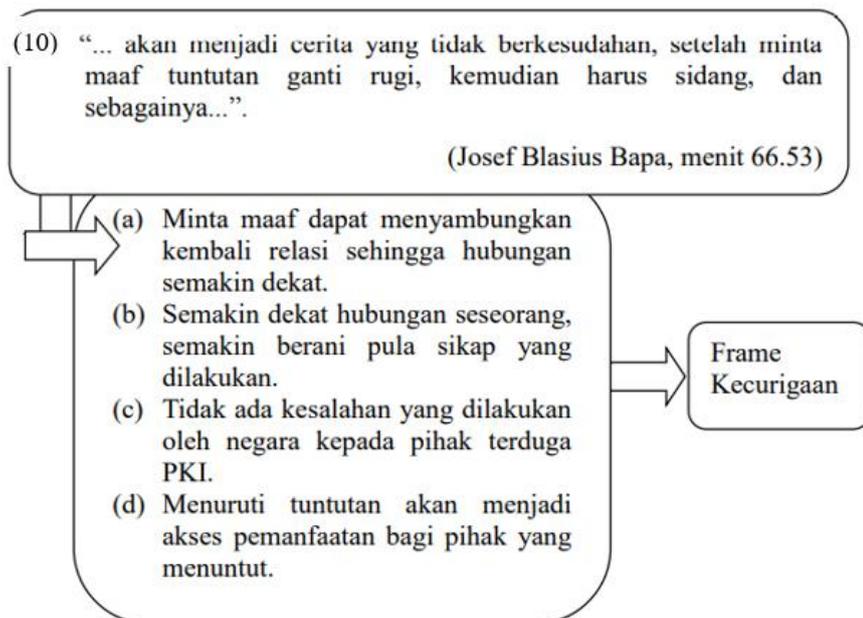
Ekspresi kebahasaan yang diungkapkan Josef Blasius Bapa tersebut, dimaknai lewat konstruksi yang dibangun dengan latar belakang pengetahuan sebagai berikut.

- (a) Minta maaf dapat menyambungkan kembali relasi sehingga hubungan semakin dekat.
- (b) Semakin dekat hubungan seseorang, semakin berani pula sikap yang dilakukan.
- (c) Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh negara kepada pihak terduga PKI.
- (d) Menuruti tuntutan akan menjadi akses pemanfaatan bagi pihak yang menuntut.

Berdasarkan latar belakang pengetahuan tersebut, dapat dimaknai bahwa "jika negara menuruti permintaan pihak keluarga dan terduga PKI atas tuntutan permintaan maaf, pihak tersebut akan memanfaatkan untuk melakukan tuntutan-tuntutan selanjutnya". Di samping itu, hal tersebut tidak terlepas dari konsep bahwa

permintaan maaf adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesalahan dan tuntutan adalah kegiatan yang meminta dengan keras. Waktu yang menjadi acuan oleh Josef Blasius Bapa adalah saat peristiwa G30S 1965 terjadi. Maka dari itu, dia merasa pihak PKI adalah pihak yang salah karena pernah melakukan kudeta yang mengorbankan para Jenderal. Selain itu, Josef Blasius Bapa mencurigai adanya tuntutan lain setelah permintaan maaf dengan mengungkapkan ‘akan menjadi cerita yang tidak berkesudahan’. Dengan demikian, *frame* yang membentuk pengetahuan dalam ekspresi kebahasaan tersebut adalah *frame* kecurigaan.

Skema 2: *Frame* Kecurigaan



Peneliti menelusuri pikiran Josef Blasius Bapa berdasarkan ekspresi kebahasaan (10) yang memiliki latar belakang pengetahuan (a) sampai (d). Pada data tersebut, Josef Blasius Bapa mencurigai adanya tuntutan lain apabila permintaan maaf dilakukan. Kecurigaan tersebut menjadi ketakutan, sehingga permintaan maaf sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian kecurigaan merupakan *frame* dalam kognisi Josef Blasius Bapa.

Berdasarkan Pemahaman Pihak NU dan Muhammadiyah

Berdasarkan pihak NU dan Muhammadiyah ditemukan hasil penelitian sebagai berikut.

(15) "... kalau saling memberi maaf rasanya terhormat semua tapi juga tidak kalah terhormatnya semuanya jika saling minta maaf..."
(Marsudi Suhud, menit 163.43)

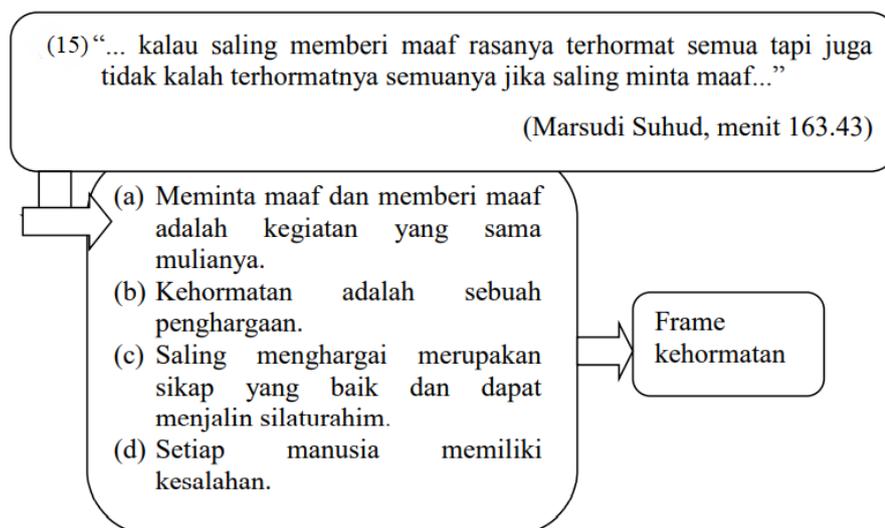
Ekspresi kebahasaan yang dituturkan oleh Marsudi Suhud tersebut, dapat dimaknai dengan membangun konstruksi berdasarkan latar belakang pengetahuan sebagai berikut.

- (a) Meminta maaf dan memberi maaf adalah kegiatan yang sama mulianya.
- (b) Kehormatan adalah sebuah penghargaan.

- (c) Saling menghargai merupakan sikap yang baik dan dapat menjalin silaturahmi.
- (d) Setiap manusia memiliki kesalahan.

Dengan latar belakang pengetahuan tersebut, dapat dimaknai bahwa “kegiatan memberi dan meminta maaf adalah kegiatan saling menghargai antarindividu”. Selain itu, hal tersebut tidak terlepas dari konsep bahwa permintaan maaf adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesalahan dan kehormatan merupakan sifat yang meninggikan martabat seseorang. Pihak NU termasuk pihak yang merasa menjadi “korban” dari PKI. Akan tetapi, pihak NU mengajak kepada setiap pihak untuk saling memberi dan meminta maaf. Waktu yang diperhatikan Marsudi Syuhud adalah waktu sebelum kejadian peristiwa G30S 1965, yang menganggap pihak NU telah menjadi “korban” dari perbuatan PKI. Kemudian, Marsudi Syuhud menyandingkan permintaan maaf dengan kata ‘terhormat’. Dengan demikian, *frame* yang membentuk pengetahuan dalam ekspresi kebahasaan tersebut adalah *frame* kehormatan.

Skema 3: *Frame* Kehormatan



Peneliti menelusuri pikiran Marsudi Syuhud berdasarkan ekspresi kebahasaan (15) yang memiliki latar belakang pengetahuan (a) sampai (d). Pada data tersebut ditunjukkan bahwa permintaan maaf adalah kegiatan yang terhormat. Ungkapan ‘terhormat’ dipahami Marsudi Syuhud sebagai penghargaan bagi individu yang melakukan permintaan maaf. Dengan demikian kehormatan merupakan *frame* dalam kognisi penuturnya.

Inferensi *Frame* Permintaan Maaf

Peneliti menemukan dua kategori *frame* yang berbeda, yakni *frame* yang membentuk ekspresi kebahasaan dan *frame* yang membentuk konsep permintaan maaf. *Frame* yang membentuk ekspresi kebahasaan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga *frame* yang berbeda berdasarkan waktunya, yaitu waktu sebelum peristiwa G30S 1965 (pihak NU dan Muhammadiyah), saat terjadi peristiwa G30S 1965 (pihak TNI AD), dan setelah peristiwa G30S 1965 (pihak keluarga dan terduga PKI). Beberapa *frame* yang membentuk konsep permintaan maaf lewat ekspresi kebahasaan yang dituturkan dalam diskusi tersebut, peneliti kategorikan kembali

menjadi tiga. Pertama, berdasarkan pemahaman pihak dan keluarga PKI, yaitu *frame* kesehatan, *frame* substansional, *frame* warisan, *frame* tujuan, *frame* penuntutan. Kedua, berdasarkan pemahaman pihak TNI AD, yaitu *frame* kecurigaan, *frame* kesadaran, *frame* penyelesaian, *frame* pengakuan, dan *frame* “korban”. Ketiga, berdasarkan pemahaman pihak NU dan Muhammadiyah, yaitu *frame* kehormatan, dan *frame* keberhasilan.

PENUTUP

Wacana yang terbangun oleh masing-masing kelompok dalam diskusi ILC “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?”, seperti pihak keluarga dan terduga PKI, pihak TNI AD, pihak NU dan Muhammadiyah memiliki perspektif yang sama, yaitu perspektif menjadi “korban”. Akan tetapi, perspektif tersebut memiliki makna dan merujuk pihak yang berbeda, masing-masing merujuk pihaknya sebagai “korban”. Berikut beberapa argumen yang menguatkan posisi masing-masing pihak dalam pemahamannya sebagai “korban” yang peneliti klasifikasikan berdasarkan subjeknya. Pertama, perspektif dengan subjek pihak keluarga dan terduga PKI, yaitu argumen mengobati luka perasaan, argumen formalitas, argumen penindakan lebih lanjut, argumen pengungkapan kebenaran, dan argumen kemuliaan. Kedua, perspektif dengan subjek pihak TNI AD, yaitu argumen tuntutan, argumen sebab-akibat, argumen penyesalan, dan argumen kesadaran diri. Ketiga, perspektif dengan subjek pihak NU dan Muhammadiyah, yaitu argumen kehormatan.

Frame yang membentuk ekspresi kebahasaan terbagi menjadi tiga *frame* yang berbeda berdasarkan waktunya, yaitu waktu sebelum peristiwa G30S (pihak NU dan Muhammadiyah), saat terjadi peristiwa G30S (pihak TNI AD), dan setelah peristiwa G30S (pihak keluarga dan terduga PKI). Beberapa *frame* yang membentuk konsep permintaan maaf lewat ekspresi kebahasaan yang dituturkan dalam diskusi tersebut, peneliti kategorikan kembali menjadi tiga. Pertama berdasarkan pemahaman pihak dan keluarga PKI, meliputi *frame* kesehatan, *frame* substansional, *frame* warisan, *frame* tujuan, *frame* penuntutan. Kedua berdasarkan pemahaman pihak TNI AD, meliputi *frame* kecurigaan, *frame* kesadaran, *frame* penyelesaian, *frame* pengakuan, dan *frame* “korban”. Ketiga berdasarkan pemahaman pihak NU dan Muhammadiyah, meliputi *frame* kehormatan, dan *frame* keberhasilan.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa permintaan maaf masih terkesan sulit dilakukan jika tiap-tiap individu masih terjebak pada klaim diri sebagai “korban”, sehingga sibuk mencari pembenaran bukan mengutamakan kesadaran.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini adalah bentuk diseminasi penelitian skripsi Imam Musyayyab yang berjudul “Metafora Konseptual, Perspektif, dan *Frame* Pada Ekspresi Permintaan Maaf: Studi Kasus Atas Diskusi Indonesian Lawyers Club “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?” (Kajian Linguistik Kognitif)”. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Sailal Arimi, M.Hum. Dalam kesempatan ini, para penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tri Mastoyo, M.Hum dan Drs. Sunarso, M.Hum yang telah memberikan masukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimi, Sailal. 2015. *Linguistik Kognitif: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: A.Com Advertising Yogyakarta.
- Evans, Vyvyan, dan Melanie Green. 2006. *Cognitive Linguistics: An Introduction*. Edinburg: Edinburg University Press.
- Evans, Vyvyan. 2007. *A Glossary of Cognitive Linguistics*. Edinburg: Edinburg University Press.
- Park, YM. 2010. *Mark's Memory Resources and the Controversy Stories (Mark 2:1-3:6): An Application of the Frame Theory of Cognitive Scienceto the Markan Oral-Aural Native*. Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Kador, John. 2011. *Dahsyatnya Maaf*. Jakarta: Penerbit Gemilang.
- Utama, Akbar Budi. 2011. "Frame Humor: Tinjauan Linguistik Kognitif terhadap Cerita Humor dalam www.ketawa.com". *Skripsi*. (Tidak Terbit). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Da, YS. 2019. "Konseptualisasi Negara Menurut Masyarakat Desa Goto Lijun, Manggarai Timur-NTT: Kajian Metafora Konseptual, Kategorisasi, *Frame*, dan Prototipe". *Tesis*. (Tidak Terbit). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Sanders, Jose dan Wilbert Spooren. 1997. "Perspective, Subjectivity, and Modality from a Cognitive Linguistic Point of View". Dalam Liebert, WA, Gisela Redeker dan Linda R. Waugh. 1997. *Discourse and Perspective in Cognitive Linguistics*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Dancygier, Barbara. 2012. "Conclusion: Multiple Viewpoints, Multiple Spaces". Dalam Dancygier, Barbara dan Eve Sweetser. 2012. *Viewpoint in Language: A Multimodal Perspektif*. New York: Cambridge University Press.
- Maruti, ES. 2016. Tindak Tutur Meminta Maaf secara *Samudana* Terselubung dalam Bahasa Jawa. *Ramah*, 5 (1): 53-73.
- Azra, Azyumardi. 2002. Korupsi dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 2 (1): 31-36.
- Yanti, Yusrita. 2001. Tindak Tutur Maaf dalam Bahasa Indonesia di Kalangan Penutur Minangkabau. *Masyarakat Linguistik Indonesia*, 19 (1): 93-104.
- Lestari, Eka MI. 2019. Budaya Permintaan Maaf di Tempat Kerja Dalam Drama Jepang: Tinjauan Sociolinguistik. *Izumi*. 8 (2): 82-100.

Sumber Data

Video ILC - 50 Tahun G30S PKI, Haruskah JOKOWI Minta Maaf Full 29 Sept 2015. (Youtube)